

## **BAB IV**

### **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN NORMALISASI HUBUNGAN BILATERAL JEPANG – KOREA SELATAN**

Dalam setiap proses yang berkembang dalam upaya normalisasi hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan, selalu terdapat berbagai macam hambatan dimana salah satunya yang sulit untuk menemukan titik temu antara keduanya adalah mengenai permasalahan sejarah yang rumit sehingga sulit diselesaikan, yaitu mengenai imperialisme yang dilakukan oleh pihak Jepang yang sarat akan kekejaman, permasalahan *jugun ianfu* dan yang permasalahan di era modern yang sering naik kepermukaan adalah mengenai perebutan kepemilikan atas pulau Dokda (bagi Korea Selatan) dan Takeshima (bagi Jepang) (Barber, 2009). Dengan berbagai masalah pelik yang dihadapi oleh kedua negara, membuat proses normalisasi sulit untuk disepakati. Kedua negara yang berusaha memperbaiki hubungannya sering “tersandung” dengan berbagai masalah yang ada.

Namun seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan muncul berbagai peristiwa di wilayah Asia Timur yang pada akhirnya mendorong kedua negara untuk secepatnya memperbaiki hubungan luar negerinya. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, permasalahan Korea Utara mengenai pengembangan nuklirnya merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan bagi kedua negara untuk secepatnya menemukan jalan keluar untuk permasalahan yang selama ini mereka hadapi. Berbagai peristiwa yang terjadi, baik itu dari internal pihak Jepang maupun Korea Selatan, ataupun faktor eksternal lain yang terjadi dapat mendorong kedua negara untuk

menyelesaikan permasalahan sehingga proses normalisasi keduanya dapat tercapai.

### **A. Faktor kepentingan keamanan kedua negara**

Pengembangan sistem rudal dan misil yang dilakukan beberapa negara di dunia, khususnya di Asia Timur telah membuat berbagai negara di dunia mengubah persepsinya. Dengan semakin canggih dan cepatnya perkembangan teknologi, pengembangan nuklir dan senjata pemusnah massal (*Weapon of Mass Destruction*) bukanlah suatu hal yang sulit. Aktor negara yang secara eksplisit disebut Jepang dan Korea Selatan sebagai ancaman bagi keduanya adalah China dan Korea Utara. Namun, dengan perbedaan sikap antara China dan Korea Selatan, Korea Utara yang sangat tertutup dan konservatif dengan dunia luar dianggap “lebih berbahaya” daripada China, sehingga Korea Utara menjadi aktor yang sangat diperhatikan gerak-geriknya oleh negara-negara dunia, khususnya negara Asia Timur terutama Jepang dan Korea Selatan.

Dilihat dari perkembangannya, program nuklir Korea Utara dimulai pada tahun 1956 yang lahir dari sebuah perjanjian dengan Uni Soviet dalam kerjasama penggunaan damai energi nuklir. Dalam perjanjian ini, Korea Utara mulai mengirim para ilmuwan dan teknisinya ke Uni Soviet untuk mendapatkan pelatihan dalam program Moskow yang bertujuan untuk melatih para ilmuwan dari negara komunis lain (Heo & Woo, 2008). Sebagian besar ilmuwan-ilmuwan nuklir Korea Utara dilatih dalam program ini. Namun teknologi yang dimiliki mereka tidak cukup maju untuk memproduksi senjata nuklir tanpa bantuan dari negara-negara lain.

Pada tahun 1964, China dengan sukses menguji bom nuklir pertamanya (Perry, 2006). Korea Utara mendekati China untuk mempelajari teknologi senjata nuklir. Namun China menanggapi dengan dingin sikap Korea Utara

tersebut, sehingga Korea Utara makin mempererat kerjasamanya dengan Moskow. Kim Il Sung mulai berpikir untuk mengembangkan kapabilitas rudal balistik sendiri. Tahun 1965 ditandai dengan pendirian Akademi Militer Hamhung, dimana paratentara Korea Utara menerima pelatihan pengembangan rudal (Bermudes Jr., 1999). Pada tahun yang sama Uni Soviet juga mulai menyediakan bantuan secara meluas pada Korea Utara dalam membangun pusat penelitian di Yongbyon.

Fasilitas nuklir yang dikembangkan pertama kali oleh Korea Utara adalah reaktor nuklir yang memiliki model yang sama dengan milik Uni Soviet dan dioperasikan untuk tujuan penelitian di Yongbyon, Korea Utara. Dalam awal perkembangannya, Uni Soviet membantu Korea Utara untuk menjalankan reaktor nuklir berdaya 5MW di fasilitas penelitian ini. Reaktor ini sangat kecil sehingga tidak menjadi perhatian negara-negara sekitar karena membutuhkan waktu yang cukup lama bagi reaktor tersebut untuk memproduksi plutonium yang cukup hingga akhirnya dapat menjadi sebuah bom nuklir. Fasilitas nuklir ini juga dilaksanakan secara independen dan terfokus pada lingkaran bahan bakar nuklir (penyulingan bahan bakarnuklir dan perubahan).

Dengan adanya fasilitas nuklir di Yongbyon dan semakin berkembangnya pusat penelitian ini, Korea Utara berhasil membuat plutonium dan mulai menguasai teknologi nuklir, yang pada akhirnya mendorong Kim Il Sung untuk membangun senjata nuklir. Bagi Korea Utara, senjata nuklir akan membuat Korea Utara lebih kuat dari Korea Selatan. Selain itu senjata nuklir dapat menangkal serangan AS dan memperkecil ketergantungan Korea Utara terhadap Uni Soviet dan China. Senjata nuklir juga memberikan jaminan keamanan tersendiri bagi Korea Utara yang selama ini tidak dapat ditawarkan oleh negara manapun dalam komunitas internasional. Lebih jauh lagi, dikarenakan Korea Utara menghadapi situasi keamanan

yang lemah terutama sepanjang Perang Korea, pengembangan senjata nuklir menjadi sumber keamanan rezim bagi Kim Il Sung dan pemimpin-pemimpin berikutnya. Berakhirnya Perang Dingin menandai berakhirnya pula bantuan bagi Korea Utara yang selama itu datang dari blok komunis. Walaupun konsentrasi persenjataan negara ini masih sangat tinggi, pimpinan militer menyadari kekuatan militer konvensional mereka masih terpaut jauh dari lawan potensial mereka, seperti Jepang, Korea Selatan, dan AS. Oleh karena itu, senjata nuklir lantas dipilih sebagai langkah deterrence jangka panjang yang kredibel.

Tidak hanya itu, Korea Utara semakin mencengangkan dunia dengan mengeluarkan diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklear (NPT) pada tanggal 10 Januari 2003, dan pada tahun 2005 dengan tegas mengklaim atas kepemilikan sejumlah senjata nuklir aktif, yang tidak dipergunakan untuk kepentingan publik dan perdamaian, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan militer. Pada tanggal 9 Oktober 2006, Korea Utara dinyatakan telah berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya, yang diuji pada sebuah terowongan di pantai timur, dan ledakan yang terjadi hingga menimbulkan gempa berkekuatan 4,2 Mb (*body wave magnitude*) yang langsung mendapatkan banyak protes dari negara tetangga terdekatnya, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Uji Coba ini dipandang mengancam stabilitas regional, melanggar kehendak DK-PBB (Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa), serta menggagalkan usaha-usaha non-proliferasi. Pada saat itu, Korea Utara telah mendapat kecaman keras dari masyarakat internasional dan PBB, untuk segera menghentikan program nuklirnya dan secara damai kembali dalam NPT. Jika tidak, maka akan diadakan pada DK-PBB untuk ditindak lanjuti. Pada akhirnya, pada tahun 2008 Korea Utara telah menuruti apa yang diharapkan masyarakat internasional, dan untuk sementara menghentikan pengembangan nuklirnya.

Namun, dengan adanya kecaman tersebut tidak secara penuh menghentikan program nuklir Korea Utara. Pada 5 April 2009 lalu, Korea Utara akhirnya meluncurkan roket dari Musudan-ri, sebuah fasilitas militer di pesisir timur Korea Utara. Klaim Korut bahwa peluncuran roket ini adalah misi penempatan satelit komunikasinya dianggap sebagai tipuan oleh Jepang, Korea Selatan serta Amerika Serikat. Mereka meyakini bahwa di balik alasan resmi tersebut Korea Utara berusaha menguji hasil pengembangan daya jangkau peluru kendalinya yang diperkirakan memiliki jangkauan hingga wilayah Alaska, sebagai bagian dari program senjata nuklir Korea Utara.

Pada Mei 2009, Korea Utara kembali meluncurkan rudal di atas negara Jepang yang diklaim sebagai rudal pengecek cuaca. Hal ini menjadi api kemarahan dunia internasional, terutama negara-negara terdekatnya, Jepang dan Korea Selatan terhadap Korea Utara, karena dengan nyata telah menunjukkan adanya ancaman yang keras terhadap perdamaian dan ketentraman negaralain.

Dengan adanya ancaman yang sangat jelas terlihat, membuat Jepang dan Korea Selatan tidak hanya diam. Hal yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keamanan serta keberlangsungan hidup bagi seluruh komponen yang ada di kedua negara tersebut. Mereka menganggap dengan tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara, akan sangat jelas mengancam keamanan nasionalnya. Keamanan nasional merupakan bagian penting dari kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Suatu negara pasti akan melindungi hak dan keselamatan warga negaranya, termasuk keberlangsungan hidup para warganya. Jepang sebagai satu-satunya negara yang pernah merasakan bom atom yang sangat dahsyat merasa bahwa adanya pembangunan kapabilitas militer terutama misil balistik dan nuklir di kawasan Asia Timur adalah ancaman serius

bagi negaranya. Begitupula dengan Korea Selatan, dimana pemerintahnya tentu tidak ingin kesejahteraan dan keamanan negaranya terganggu oleh tindakan pengembangan nuklir Korea Utara tersebut. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor keamanan negara merupakan faktor domestik yang penting, sehingga kedua negara, baik Jepang maupun Korea Selatan terdorong untuk secepatnya melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan. Cara yang tepat adalah dengan melakukan aliansi, dimana kedua negara haruslah menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi terlebih dahulu.

Masalah keamanan di kawasan Asia Timur bukan hanya menyangkut masalahpersaingan Timur dan Barat, masalah itu menyangkut dimensi yang sangat kompleks, baik dimensi sosial, politik, budaya, geografi, sejarah, maupun ekonomi. Benih-benih konflik yang ada, baik yang laten maupun yang manifes, terdapat di dalam negeri masing-masing negara maupun antar negara. Situasi keamanan di kawasan Asia Timur pasca Perang Dingin masih belum menentu, tidak mengherankan bahwa dimasa kini masing-masing negara dikawasan Asia Timur berlomba-lomba untuk membeli peralatan tempur dalam rangka meningkatkan kemampuan militernya.

Kekuatan negara di kawasan Asia Timur semakin meningkat dan berpotensi sebagai kekuatan penting dalam struktur Internasional baru, dan diharapkan mampu berperan menjaga keamanan dan stabilitas internasional. Pembangunan ekonomi, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kekuatan nasional, menjadi prioritas setiap negara. Beberapa negara Asia khususnya di kawasan Asia Timur telah bangkit dari krisis ekonomi dan perekonomiannya telah pulih dengan prospek yang sangat cerah.

Dalam menjaga keamanan, faktor militer masih menduduki posisi penting dalam keamanan negara, walaupun dalam lingkungan keamanan internasional ditekankan penyelesaian konflik melalui pendekatan politik, ekonomi, dan diplomasi, namun masih banyak negara menganggap cara militer merupakan usaha terpenting untuk menjag akeamanan dan kepentingan nasional. Reformasi militer besar-besaran dilakukan dengan mengembangkan senjata teknologi tinggi hampir dilakukan di seluruh dunia untuk beradaptasi dengan situasi baru dan dalam rangka menjaga kepentingannya masing-masing, beberapa negara telah menyesuaikan kebijakan militer, strategi militer dan meningkatkan pertahanan dalam memperbaiki kualitas kekuatan militer. Ditingkat regional, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur belum seluruhnya mampu menjamin kondisi kondusif, beberapa negara berkesempatan menggunakan peningkatan ekonomi untuk memfasilitasi pengembangan militer, dengan alasan kekuatan militer merupakan instrumen untuk mencapai kepentingan nasional yang digunakan pemerintah untuk melindungi negara dari agresi.

Namun beberapa negara di dunia, tidak terkecuali negara-negara di Asia timur memandang aman perkembangan militer suatu negara yang lain. Seperti yang dijelaskan dalam konsep *Security Dilema*, ketika suatu negara melakukan sesuatu untuk meningkatkan keamanan negaranya, hal ini dapat mendorong kekhawatiran atau ketakutan dari negara lain karena menyangkut keamanan negaranya. Maka ketika suatu negara memperkuat pertahanan atau kekuatan militernya, negara lain akan cenderung melakukan hal yang sama, dan nantinya hal ini akan mengakibatkan persaingan senjata (*arms race*). Hal ini terjadi pada negara-negara di Asia Timur, yang menganggap bahwa penguatan keamanan suatu negara dapat menjadi ancaman bagi negaranya, dalam hal ini pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara.

Alasan utama Korea Utara dalam mempertahankan nuklirnya adalah untuk melindungi keamanan negaranya terutama dari agresi militer Amerika Serikat yang dipandang sebagai ancaman. Maka, dengan cara diplomasi koersifnya ini pulalah, Korea Utara mengancam balik Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya. Korea Utara juga meyakini bahwa program nuklirnya adalah sarana (instrumen) diplomasi yang efektif untuk membawa Amerika Serikat terhadap meja negosiasi (perundingan), maupun sebagai suatu alat penjamin keamanan rezimnya. Dalam proses negosiasi itu, Korea Utara memercayai bahwa selain menjaga keamanan rezimnya, program nuklir itu juga akan bisa mendapat keuntungan ekonomi seperti program bantuan pangan, pendanaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Korea Utara mengejar program nuklir sebagai strategi inti agenda utama nasional. Dengan kata lain, Korea Utara menggunakan nuklir sebagai instrumen diplomasi dengan negara-negara “lawan” demi meraih kepentingan nasionalnya.

Terlepas dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah mengancam rezim anti pengembangan bahan nuklir dan juga telah menciptakan konflik keamanan yang cukup serius, tidak hanya pada kawasan Asia Timur tetapi juga untuk seluruh masyarakat internasional. Jika hal yang dilakukan oleh Korea Utara tidak ditangani dengan tegas, maka tentu keamanan wilayah, terutama wilayah regional akan terganggu. Cara yang dianggap paling efektif untuk meredam Korea Utara adalah dengan cara *balancing* kekuatan yang dimiliki Korea Utara. *Balancing* ini akan sangat tepat dan efisien jika dilakukan oleh negara terdekat dari Korea Utara. Jepang dan Korea Selatan dianggap sebagai aktor yang tepat untuk meredam “keganasan” Korea Utara. China merupakan negara yang kuat dan mampu untuk menyaingi Korea Utara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa China mempunyai tujuan tersendiri yang



ingin dicapai. Maka dengan berbagai keadaan yang ada, demi menjaga kestabilan dan keamanan wilayah maka kedua negara tersebut harus beraliansi dan melakukan *balancing* terhadap kekuatan Korea Utara.

## **B. Dorongan *dominant power* yang kuat dalam proses normalisasi**

Proses normalisasi hubungan bilateral Jepang – Korea Selatan akan sulit tercapai dan akan menemui jalan buntu jika tidak ada aktor intrusif yang terlibat sebagai pendorong tercapainya kesepakatan antara kedua negara tersebut. Aktor intrusif yang memiliki peran penting dalam proses normalisasi kedua negara adalah negara yang secara geografis terletak cukup jauh dari wilayah kedua negara tersebut, namun memiliki pengaruh yang besar dan pernah terlibat dalam masa lampau kedua negara tersebut. Amerika Serikat, negara adidaya tersebut memiliki pengaruh dan andil yang besar dalam proses normalisasi hubungan Jepang – Korea Selatan. Seperti di wilayah lain, keterlibatan Amerika dalam suatu permasalahan negara tentu memiliki suatu maksud dan kepentingan tersendiri, tidak terkecuali dalam keterlibatannya dengan normalisasi hubungan Jepang – Korea Selatan ini.

Amerika Serikat merupakan negara yang sangat berpengaruh dalam pecahnya Korea menjadi dua negara (Korea Utara dan Korea Selatan) dan pembentukan negara Korea Selatan, sementara Korea Selatan sendiri merupakan salah satu negara bekas jajahan Jepang. Terlepas dari latar belakang sejarah yang tidak terlalu baik, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan memiliki interaksi dalam kerjasama yang dapat dikatakan intens. Bahkan Jepang sebagai negara yang telah dibuat babak belur oleh Amerika Serikat pada peristiwa pemboman kota Hiroshima dan

Nagasaki tetap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat.

Dengan posisi Amerika tersebut, ketika melihat gejolak hubungan bilateral dua negara ini Amerika Serikat selaku negara yang memiliki hubungan kerjasama trilateral dengan dua negara yang sedang berseteru tidak tinggal diam. Tindakan terbaru Amerika, melalui Marie Harf, Wakil jebir Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada waktu itu, pada hari Rabu 19 februari 2014 mengungkapkan, Washington berharap Seoul dan Tokyo bekerjasama untuk menyelesaikan perseteruan mereka melaluiperundingan. Tentunya dari perseteruan yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatandapat menghambat tercapainya tujuan kerjasama trilateral ketiga negara, terkhusus kepentingan Amerika Serikat sendiri(Harf). Kerjasama trilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh tiga pihak (negara) untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama trilateral Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang memiliki sejarah panjang dalam urusan kerjasama maritim tertanda awal saat terjadinya perang korea. Bahkan sebelum kerjasama trilateral initerjalin, kerjasama bilateral antara tiga negara ini sudah lebih dulu ada, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan yang telah berhubungan bahkan sebelum Korea Selatan berdiri sebagai sebuah negara. Kerjasama trilateral antara Amerika Serikat, Jepang dan Korea bergerak dibidang keamanan. Kerjasama ini terbentuk dari adanya ancaman yang datang dari Negara tetangga Jepang dan KoreaSelatan yaitu Korea Utara. Kerjasama dibidang militer dan keamanan ini merupakan tindak lanjut dari ketegangan dikawasan Asia Timur yang disebabkan oleh ulah Korea Utara yang secara terang-terangan mengembangkan nuklir untuk persenjataan dan peningkatan kapabilitas militer China sepihak.

Jelas hal ini menjadi sebuah ancaman serius bagi Amerika Serikat terlebih China dan Korea Utara memiliki perbedaan ideologi dengan Amerika serikat. *Containment*

*Policy* masih sangat dipegang kuat Amerika dalam arah kebijakan luar negerinya, *Containment policy* menjadi justifikasi bagi AS untuk melancarkan geostrateginya ke wilayah Asia Timur sebagai upaya membendung penyebaran pengaruh komunisme yang diwariskan Soviet. Cina dan Korea Utara merupakan negara dengan ideologi komunis sangat kental. Dengan ideologi non demokratisnya, akan dipastikan Cina dan Korea Utara memiliki sifat ekspansif layaknya Soviet (Djafar, 2009).

Amerika Serikat sebagai negara yang paling dominan dalam upaya memperbaiki kerusakan hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. Di setiap kesempatan dalam pertemuan petinggi tiga negara ini Amerika Serikat selalu menyatakan pentingnya hubungan baik antara Jepang dan Korea Selatan. Ditahun 2014 tercatat Amerika Serikat telah beberapa kali mengungkapkan melalui perwakilannya begitunya penting hubungan baik antara Jepang dan Korea Selatan. Pada tanggal 4 Februari 2014, Amerika Serikat melalui Danie Russel, Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Asia Timur dan Pasifik kembali mendesak Jepang dan Korea Selatan agar menyelesaikan ketegangan antara kedua negara. Hal itu dikarenakan Amerika mulai cemas akan provokasi tiada henti dari Korea Utara dan juga modernisasi militer China (The Global Review).

Permasalahan yang melibatkan dua negara sekutu Amerika Serikat ini menyebabkan dilema bagi Amerika Serikat. Bagaimana tidak, renggangnya hubungan Jepang dan Korea Selatan membuat tidak kondusifnya kerjasama keamanan yang dibangun oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Dimana semestinya kedua negara sama-sama fokus untuk menghadapi nuklir Korea Utara, namun akibat renggangnya hubungan membuat kedua negara ini saling mencurigai. Amerika Serikat melakukan beberapa cara diantaranya mencoba menjadi penengah dan mediator dalam konflik Jepang dan Korea Selatan guna

menghasilkan hubungan bilateral yang lebih baik bagi kedua negara. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh bila negara yang bersengketa mengalami kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahannya. Salah satu cara yang sering digunakan adalah Mediasi.

Upaya yang terbaru dilakukan oleh Amerika Serikat untuk dapat menjadi mediator adalah saat dimana Jepang dan Korea Selatan bertemu di Seoul. Pertemuan setara wakil menteri luar negeri ini merupakan hasil dari pernyataan sebelumnya oleh Danie Russel, bahwa Jepang dan Korea Selatan harus segera memperbaiki hubungan bilateralnya karena akan berdampak bukan hanya bagi Amerika tapi bagi stabilitas keamanan di Asia Timur. Pada pertemuan yang berlangsung pada tanggal 13 Maret 2014 itu membuahakan sebuah komitmen kuat kedua negara untuk memperbaiki hubungan bilateralnya dan mengharapkan Barrack Obama selaku presiden Amerika Serikat dapat menjadi mediator dalam pertemuan yang akan digelar di Den Haag, Belanda pada 24-25 Maret 2014. Obama menekankan bahwa Seoul, Washington dan Tokyo harus meningkatkan aliansi mereka bagi perdamaian dan keamanan di regional tersebut. Abe mengatakan KTT pada waktu itu sangat berarti pada hal para pemimpin tiga negara mengadakan pembicaraan ekstensif terkait keamanan. Ketiga pemimpin juga memberikan penilaian soal situasi ambisi nuklir Koru tdan membahas cara-cara untuk meningkatkan kerjasama denuklirisasi Semenanjung Korea.

Pada dasarnya, Amerika memiliki kepentingan besar dalam upayanya memperbaiki hubungan bilateral Jepang–Korea Selatan. Kepentingan Amerika dalam upaya normalisasi tersebut berkaitan erat dengan Kepentingan Politik dan Keamanan Nasional Amerika Serikat.

## **1. Kepentingan Politik**

Perang ideologi yang terjadi pada perang dingin antara dua kekuatan besar dunia Amerika Serikat dan Uni Soviet menghasilkan sebuah kebijakan, *Containment policy* yang lahir dari sikap Amerika Serikat. *Containment policy* merupakan kebijakan Amerika Serikat untuk membatasi dan membendung berbagai pengaruh komunis dari Uni Soviet. Meski saat Uni Soviet tidak lagi ada namun bekas dan warisan dari kekuasaan Uni Soviet yang berupa Ideologi Komunis masih dipakai di beberapa negara. China dan Korea Utara merupakan negara yang tetap kokoh mempertahankan ideologi komunis yang kental. Dengan ideologi non demokratisnya, akan dipastikan China dan Korea Utara memiliki sifat ekspansif layaknya Soviet. Atas dasar itu pula, pada tahun 2010 melihat pergerakan China yang kian meningkat dari segi ekonomi setelah mencoba melonggarkan nilai-nilai komunis dan menerima sistem kapitalis, Amerika Serikat merubah arah kebijakan luar negerinya dari Timur Tengah ke Asia Pasifik.

Selain itu, pasca Perang Dingin menjadikan Amerika Serikat sebagai satu satunya *super power* di dunia ini. Tentu dengan kehadiran China dan Korea Utara sebagai negara kuat dibidang militer dikawasan asia pasifik terkhusus dikawasan Asia Timur akan mempengaruhi stabilitas regional, serta dapat menghambat pergerakan Amerika Serikat sendiri dan juga memperlemah posisi hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Jelas hal ini menjadi sebuah ancaman serius bagi Amerika Serikat terlebih China dan Korea Utara memiliki perbedaan ideologi dengan Amerika Serikat. *Containment Policy* masih sangat dipegang kuat Amerika dalam arah kebijakan luar negerinya.

## **2. Kepentingan Keamanan**

Tujuan politik luar negeri untuk mempertahankan kepentingan nasional berkaitan dengan upaya mempertahankan keamanan nasional. Makna keamanan (*security*) bukan sekedar kondisi aman tenteram tetapi keselamatan atau kelangsungan hidup bangsa dan negara. Amerika Serikat memiliki kepentingan dengan Jepang dan Korea Selatan guna menciptakan keamanan kawasan Asia Timur. Melalui basis pertahanan di Jepang dan Korea Selatan, Amerika berharap dapat menciptakan stabilitas regional Kawasan Asia Timur. Tentunya dengan hubungan yang baik antara Jepang dan Korea Selatan ketiga negara dapat lebih kokoh dalam menangani isu keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur. Secara tidak langsung Amerika Serikat telah mempertahankan dirinya dan membangun kekuatan untuk dirinya di kawasan Asia Timur.